

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar pada tanggal 20 Oktober 1964 di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno oleh Angkatan Darat (TNI) untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

"Golkar yang kemudian dijadikan sebagai brokerage party (penyalur kepentingan, tetapi bukan ideologi). Kekuatan politik Golkar ditunjang kelompok induk organisasi (kino) seperti Soksi, MKGR, FBSI, dll yang sebelumnya merupakan orang-orang sipil namun selalu disamping Militer. Sebagai

partai terbesar yang tak tertandingi , Golkar Merupakan jembatan kepentingan antara militer dan teknokrat (Lev , 1966). ”¹

Pada tahun 1978, dalam munas Golkar pun menyatakan diri sebagai organisasi kader dan kaderisasi Golkar yang tadinya merupakan program sampingan menjadi salah satu agenda partai, sejak tahun 1983 menjadi program utama. Organisasi-organisasi yang mendirikan Sekber Golkar maupun yang didirikan Golkar, dinyatakan sebagai organisasi yang lepas dari ikatan struktural namun masih terhubungkan dengan ikatan historis. Dengan demikian embrio yang tercipta dalam pola BKS (Badan Kerjasama Sipil) Sipil-Militer kemudian lahir sebagai kekuatan politik dalam diri Sekber Golkar lantas menjelma menjadi jaringan keluarga besar golongan karya dengan Golkar sebagai sayap politiknya. Pada periode 1983-1988, kaderisasi berskala besar yang dilakukan Golkar merupakan juga puncak perekrutan bagi generasi muda sipil non birokrasi dari organisasi-organisasi kemasyarakatan pemuda.

Keluarga besar golongan karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A (ABRI) untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur tersebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. Komposisi kepengurusan Golkar disusun sesuai kehendak Dewan

¹ Indro Cahyono, *Lahirnya Kelompok Bisnis Penyandang dana kekuatan yang mengaku sayap*
Indro Cahyono, 1996, *Indro Cahyono*, Jakarta: PT Gramedia, hal. 100-101, diakses tanggal 25 sept 2007

Pembina untuk “menjadikan Golkar makin mandiri, makin dewasa, dan makin berakar”, yang berarti keterlibatan langsung pengendali tiga jalur di Dewan Pembina berangsur dikurangi seiring dengan penguatan peran Golkar sebagai organisasi politik. Pada tahun 1964 untuk menghadapi kekuatan PKI (dan Bung Karno), golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat (seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Berakhirnya era orde baru mengakibatkan Golkar menjadi tumpuan semua kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat di masa lalu mengingat pada masa orde baru mayoritas elite politik yang menduduki pemerintahan adalah kader Golkar. Meskipun demikian fakta memperlihatkan meskipun menjadi tumpuan kesalahan. Tidak hanya itu, Golkar juga kehilangan penyangga utamanya yaitu ABRI dan Birokrasi. Golkar masih berada pada level atas dalam hal perolehan suara pada pemilu. Hal ini membuktikan masih adanya kekuatan penopang Golkar yang masih kuat.

Selain ABRI dan Birokrasi, Golkar juga mempunyai delapan Ormas pendukung (Hasta Karya) antara lain Kesatuan Organisasi Serba Guna Gotong Royong (Kosgoro), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Himpunan Wanita Kekarya (HKW),

(MDI). Selain Hasta Karya Golkar juga mempunyai Organisasi Sayap, yaitu Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG).² Organisasi-organisasi pendukung inilah yang menjaga Golkar tetap eksis dan bertahan sampai sekarang. Penelitian ini akan mencoba untuk melihat bagaimana relasi antara organisasi SOKSI, KOSGORO, MKGR, dan AMPI dengan partai Golkar dalam konteks dimensi value infusion, yang nantinya akan mengetahui sifat relasi di antara masing-masing organisasi pendukung partai Golkar tersebut.

Penelitian ini mengambil contoh ormas MKGR, SOKSI, KOSGORO dan AMPI karena MKGR SOKSI dan KOSGORO merupakan lanjutan dari Kelompok induk Organisasi yang mendirikan Golkar ketika itu sehingga mempunyai peran besar dalam kemajuan Partai Golkar untuk saat ini. Sedangkan AMPI karena sifat relasi AMPI dan partai Golkar terdapat konflik dengan berdirinya AMPI sebagai OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda) dan bukan lagi sebagai Underbownya Golkar lagi. Akan tetapi meskipun demikian kedekatan historis baik Tri Karya dan AMPI akan menarik untuk di kaji dan diteliti dalam penulisan ini.

Organisasi pendukung partai adalah kelompok-kelompok yang mendukung sebuah partai politik dan mempunyai peran besar dalam menentukan kemajuan sebuah Partai politik. Dalam efek klientilisme Hubungan

² <http://www.malang.go.id>, 2007, 14 Mei 2009, Golkar Berjalan Meria Ormas Pendukung, detik.com

Organisasi pendukung dengan Partai Politik ini mempunyai dua sifat yaitu: pertama, Instrumentalis dan yang kedua ideologis. Instrumentalis berarti kedekatan organisasi pendukung dengan partai politiknya hanya berdasarkan kepentingan semata untuk mendapatkan nilai-nilai politik. Sedangkan sifat ideologis adalah kedekatan organisasi pendukung dengan partainya atas dasar ikatan ideology tanpa mengharapkan nilai-nilai politik tertentu.

Penelitian ini mengambil kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian, disamping sebagai Ibu kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta merupakan sebuah propinsi yang berpredikat sebagai Daerah Istimewa yang didapatkan atas iklim intelektualitasnya yang cukup tinggi sehingga kemudian disebut sebagai kota Pelajar³. Hal ini mengingat banyaknya lembaga pendidikan dari berbagai tingkat yang ada di Propinsi D.I Yogyakarta. Sehingga Yogyakarta mempunyai Sumber Daya Manusia yang cukup tinggi untuk mempengaruhi sebuah iklim politik.

Faktor keberadaan Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku raja di Yogyakarta mempunyai nilai tersendiri dalam perpolitikan di daerah, selain itu Sri Sultan juga menduduki posisi sebagai salah satu penasehat di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Jika dikaitkan dengan konteks Golkar di daerah keberadaannya sangat disegani dan berpengaruh di tingkat lokal maupun Nasional. Bahkan dari berbagai kasus yang mengikutsertakan Sri Sultan lebih

³ Tunjung Sulaksono, 2000, *Konflik Pusat-Daerah dalam Rekrutmen Elit Lokal: Studi Kasus*
Pendidikan Gubernur DIY 1998. Skripsi: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM Yogyakarta

cenderung konsentrasi di pusat daripada di daerah contohnya adalah pencalonan beliau sebagai Presiden pada Tahun 2004.

Sri Sultan memang dikenal sebagai sosok yang “netral” di antara berbagai kepentingan partai politik dan pemerintah. Karenanya, Sultan banyak diundang dalam seminar-seminar untuk membeberkan wawasan kebangsaannya. Dalam suatu kesempatan, Sultan pernah mengatakan, wawasan kebangsaan masa depan seharusnya merupakan pandangan proaktif untuk membangun bangsa menuju perwujudan cita-cita bersama sebagai suatu bangsa yang mandiri dan mampu mengembangkan inovasi iptek bangsa sendiri, agar memiliki keunggulan daya saing yang tangguh di percaturan global⁴.

Salah satu kewenangan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai salah satu Dewan Pimpinan Pusat adalah menentukan kebijakan tingkat Nasional sesuai dengan AD, ART, Keputusan Munas/Munaslub dan Rapimnas serta Peraturan Organisasi Partai Golkar. Dan berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan AD,ART, keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional serta Partai⁵. Sehingga jelas bahwa peran Sri Sultan lebih banyak terlihat di tingkat pusat daripada di daerah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Sri Sultan mempunyai Peran yang besar di daerah.

⁴ R.S. Haryadi, 2005, Tokoh Indonesia, www.Golkar.or.id, diakses tanggal 17 sept 2007

Menurut Kart dan Mair partai Politik terbagi menjadi tiga jenis konteks pengorganisasian, yaitu: pertama, Ranah Party on the Ground, kedua, Party in Central Office (Partai pada tingkat pusat), dan yang ketiga Party in Publik Office (partai yang berada dalam pemerintahan), yang diwakili oleh anggota-anggotanya yang mendapat kesempatan menduduki jabatan-jabatan publik. Dalam fokus penelitian ini adalah pada Party On the Ground sebagai obyek penelitian karena partai pada level ini berhadapan langsung dengan massa pada level grass-roots, pada level ini partai menjadi ujung tombak cerminan partai politik secara total atau keseluruhan.

Dalam konteks lokal, Partai Golkar ditingkat daerah juga mampu menunjukkan eksistensinya pada masa Reformasi. Seperti halnya yang terjadi Yogyakarta. Golkar masih berada pada peringkat atas perolehan suara pada pemilu 1999 dan 2004. hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Lima Besar Hasil Pemilu 1999 di Kota Yogyakarta

No.	Parpol	Perolehan suara
1.	PDIP	42,3%
2.	PAN	25,5%
3.	GOLKAR	11,9%
4.	PPP	5,3%
5.	PKB	4,6%

Tabel 1.2

Lima Besar Parpol Hasil Pemilu 2004 di Kota Yogyakarta

No.	Parpol	Perolehan suara
1.	PDIP	26,7%
2.	PAN	23,7%
3.	GOLKAR	11,1%
4.	Keadilan Sejahtera	10,3%
5.	Demokrat	9,5%

Sumber: kpu.jogja.go.id

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Golkar berada di posisi ketiga baik di pemilu tahun 1999 maupun 2004. kita tahu bahwa Golkar paska orde baru mengalami tranformasi dalam dirinya menjadi Partai Politik. Dia wal reformasi Golkar mempunyai image yang sangat buruk hal ini tidak lepas dari pencitraan media massa yang banyak memperbincangkan Golkar paska runtuhnya orde baru. Akan tetapi, di tingkat pusat Hal tersebut tak begitu berpengaruh karena meskipun Golkar turun beberapa tingkat dalam perolehan suara pada pemilu tahun 1999 akan tetapi di pemilu 2004 lalu Golkar kembali meraih kemenangan dalam pemilu tersebut.

Ditingkat lokal seperti yang kita lihat pada tabel, ternyata efek dari pencitraan media tresebut tidak begitu berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Golkar ditingkat daerah. Hal ini mempunyai nilai tersendiri pada partai golkar di kota Yogyakarta karena dari hasil perolehan suara, dan memaparkan bahwa politik di kota Yogyakarta relatif stabil

Dibanding dengan Daerah lain di Indonesia masyarakat Yogyakarta jauh lebih maju dalam mengenal perpolitikan hal ini dapat dilihat dari berbagai organisasi yang lahir di Yogyakarta. Seperti Muhammadiyah, Taman Siswa, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat di Kota Yogyakarta mempunyai partisipasi politik yang tinggi hal ini didorong oleh tingginya sumber daya manusia yang miliki.

Sebagai representasi di daerah, DPD partai Golkar kota Yogyakarta juga dapat dilihat serupa partai golkar pada level pusat. Dimana berbagai organisasi pendukungnya juga terorganisir dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. partai Golkar telah menjadi pusat gerakan dari berbagai organisasi massa dan kepemudaan yang secara politis berafiliasi kepada Golkar, seperti KOSGORO, SOKSI, MKGR, FKKP, AMPI. Hasil perolehan suara tidak lepas dari peran berbagai organisasi pendukung dalam mendukung partai Golkar. Bahkan tidak mungkin jika golkar berusaha sendiri dalam pemilu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimanakah

Relasi antara Organisasi Kosgoro, MKGR, AMPI dan SOKSI dengan Partai

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah relasi dari masing-masing organisasi Kosgoro, MKGR, SOKSI, dan AMPI terhadap Partai DPD Partai Golkar?
2. Bagaimanakah Efek Klientilistik dari relasi Organisasi Kosgoro, MKGR, dan SOKSI, dan AMPI terhadap DPD Partai Golkar kota Yogyakarta?

D. Kerangka Teori

Kerangka dasar teori adalah untuk menganalisis suatu permasalahan untuk dijadikan acuan berpikir berupa konsep dan teori untuk mempermudah pemahaman tentang konsep-konsep yang digunakan dalam menganalisa suatu permasalahan, kerangka dasar dalam penulisan ini antara lain:

1. Partai Politik

1.1 Pengertian partai politik

Hal yang paling mendasar untuk mengetahui Partai Politik adalah dengan mengetahui Pengertiannya terlebih dahulu. Ada beberapa pengertian oleh para ahli ilmu Politik tentang definisi Partai politik antara lain:

a. Carl. J.Friedrich

Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan tertentu dan berdasarkan

penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil⁶.

b. Jean Blondel

Partai Politik adalah kelompok keanggotaan terbuka yang focus dengan spectrum soal-soal kebijakan.⁷

c. Sigmund Neumann

Partai Politik sebagai sebuah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda⁸.

d. R.H Soltau

Merumuskan Partai Politik sebagai suatu golongan rakyat yang tersusun yang bertindak sebagai kesatuan politik dan dengan penggunaan kekuasaan memberikan suara bertujuan untuk mengawasi pemerintah dan melaksanakan politik untuk mereka⁹.

⁶ Budi Suryadi, 2006, *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia*, IRCiSoid, Yogyakarta. Hal 57

⁷ Ibid.

⁸ 1988, *... ..* Jakarta hal 267

e. **Edmund Burke**

Partai politik merupakan sekelompok manusia yang secara bersama-sama menyetujui prinsip tertentu untuk meleyani kepentingan bersama.¹⁰

Dari berbagai pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Partai politik adalah kelompok atau persekutuan individu-individu yang terorganisir untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Guna mendapatkan kekuasaan dalam Pemilihan Umum.

1.2 Fungsi Partai Politik

Dalam sebuah system Politik, Partai Politik mempunyai beberapa fungsi yaitu:

➤ **Fungsi Artikulasi Kepentingan**

Fungsi Artikulasi Kepentingan adalah suatu proses memadukan berbagai kebutuhan, tuntutan dan Kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legilatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhannya kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan

➤ **Fungsi Agregasi Kepentingan**

Fungsi Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan dari berbagai kelompok-kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternatif pembuatan kebijakan publik. Agregasi kepentingan ini sangat erat kaitannya dengan relasi antara masyarakat luas yang mengagregasikan diri atau diagregasikan oleh pemimpin politik. Naik upaya dalam membawa pada tingkat modernisasi.

➤ **Fungsi Partisipasi Politik**

Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan ikut dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Dalam hal ini, partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses partai politik.

➤ **Fungsi Sosialisasi Politik**

Yang dimaksud dengan Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam

sikap-sikap, dan etika politik yang berlaku atau dianut oleh sebuah Negara. Proses ini berlangsung secara sengaja melalui formal, non-formal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalamansehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun masyarakat

➤ Fungsi Rekrutmen Politik

Fungsi rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau kelompok orang yang melaksanakan sejumlah peranan dalam system politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Serta meregenerasi untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partisipan melalui antar pribadi, organisasi dan juga mempersiapkan kader-kader baru untuk menggantikan kader sebelumnya.

➤ Fungsi Komunikasi Politik

Fungsi komunikasi politik adalah menyalurkan aneka ragam aspirasi masyarakat dalam proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini para politik menjadi komunikator politik. Dan merupakan salah satu fungsi untuk

..... dalam komunikasi informasi dan gagasan politik

1.3 Kategori Partai Politik berdasarkan Fungsi

1. Partai Proto

Jenis partai politik ini biasanya ada dalam lingkungan parlemen, basis pendukungnya adalah kelas menengah keatas, basis dukungan dan bentuk organisasinya relatif sederhana.. belum sepenuhnya sebagaimana partai modern. Ciri yang paling menonjol adalah pembedaan kelompok anggota dan kelompok non anggota dan faksi yang masih menonjol. Elite partai biasanya diisi oleh orang-orang kelas bangsawan.

2. Partai Kader

Partai ini berkembang akibat dari hak pilih yang belum diberikan masyarakat secara meluas, anggotanya kebanyakan kelas menengah keatas, dan tidak memerlukan organisasi besar untuk memobilisasi massa. Tingkat ideologi dan organisasinya relatif rendah, hal ini disebabkan pada aktifitasnya jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat.

3. Partai Massa

Jenis Partai ini muncul karena adanya perluasan hak pilih rakyat, parpol jenis ini dibentuk diluar parlemen, orientasinya pada basis pendukung seperti buruh, petani, pekerja, dan massa yang lainnya yang bertujuan mendidikan politik dan

4. Partai Diktatorial

Partai jenis ini merupakan sub-tipe dari partai massa akan tetapi ideologinya bersifat kaku dan radikal. Pada kepemimpinan partai terdapat kontrol ketat, sehingga anggota partai dituntut untuk mengabdikan secara penuh. Tidak hanya ketat dalam hal kepemimpinan akan tetapi dalam hal rekrutmen dan kaderisasi anggotanya pun sangat ketat dalam konteks konsistensi ideologi yang dianut.

5. Partai Catch-all

Jenis partai ini merupakan gabungan dari jenis partai kader dan partai mass, mereka berusaha menampung kelompok kepentingan dan penekan dan ideologinya tidak terlalu kaku, seperti halnya partai-partai pemenang pada pemilu 1999 masuk dalam jenis ini. Partai jenis ini tidak mengandalkan ideologi akan tetapi penguatan pada kuantitas basis massa meskipun demikian mereka juga melakukan kaderisasi pada internal elite pengurusnya. Sehingga konsekuensinya adalah proses pendidikan politik terabaikan.

1.4 Tipologi Partai Politik

Ramlan Subakti (1999), mengklasifikasikan partai Politik sebagai
1. Partai Politik mempunyai klasifikasi berdasarkan kriteria

tertentu seperti asas dan orientasi komposisi dan fungsi anggot, basis sosial dan tujuan.

Berdasarkan Asas dan Orientasi

Ada tiga Tipologi Partai Politik berdasarkan Asas dan Orientasi adalah:

- **Partai politik Pragmatis**

Partai Politik Pragmatis adalah Partai Politik yang yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat oleh suatu doktrin atau ideologi tertentu. Yaitu perubahan dalam partai politik berupa kepemimpinan, perubahan situasi akan mengubah program dari partai tersebut. Partai Politik Pragmatis ini bisa dikatakan sebagai cerminan dari pemimpin partai tersebut. Partai ini biasanya terorganisir secara longgar hal ini bukan berarti partai pragmatis ini tidak mempunyai ideologi. Partai pragmatis ini hanya biasanya hanya ada dalam sistem dua partai yang berkompetisi. Partai Demokrat dan Partai Republik merupakan contoh partai Pragmatis.

- **Partai Politik Doktriner**

Partai doktriner adalah suatu partai yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran dari ideologi.

Sehingga pergantian kepemimpinan mengubah gaya

tertentu, namun tidak mengubah

prinsip dan program dasar partai, karena ideologi partai sudah dirumuskan secara konkret dan terorganisasi secara ketat. Sebagai contoh adalah partai komunis merupakan partai doktriner.

- **Partai Politik Kepentingan**

Partai kepentingan merupakan partai politik yang dibentuk dan dikelola berdasarkan kepentingan tertentu seperti, petani, buruh, agama, yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan. Partai ini dapat ditemukan dalam sistem politik banyak partai (multi partai). Sebagai contohnya adalah partai buruh di Australia dan partai petani di Swiss.

Sedangkan berdasarkan komposisi dan fungsi anggota, partai politik dapat digolongkan menjadi dua yaitu Partai Massa dan Partai Kader. Partai massa adalah partai politik yang mengandalkan kekuatan pada jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya. Sehingga Pemilu dapat dengan mudah dimenangkan. Sedangkan partai Kader adalah partai yang mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan. Seleksi dalam organisasi kader biasanya sangat ketat sedangkan struktur organisasi berifat hierarkis. Karena sifatnya yang demikian partai kader disebut juga sebagai partai

..... contoh adalah Nazi Jerman dan Partai Komunis

Berdasarkan Basis sosial dan Tujuan, Almond menggolongkan partai politik berdasarkan basis sosial dan tujuan yang dibagi menjadi empat tipe, yaitu:

- a. partai Politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah dan bawah.
- b. Partai politik yang beranggotakan dari kalangan kelompok kepentingan tertentu seperti petani, buruh dan pengusaha
- c. Partai politik yang beranggotakan pemeluk agama tertentu, seperti islam, katholik, protestan dan lain sebagainya.
- d. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu.

Meskipun dalam kenyataannya, kebanyakan partai politik tak hanya mempunyai basis sosial dari kalangan tertentu, akan tetapi dari berbagai kalangan dengan satu atau dua kelompok sebagai sebagai pihak yang dominan.

1.5 Sejarah Kepartaian di Indonesia

Perpolitikan di Indonesia sebenarnya tidak lepas dari pengaruh pemikiran dunia. Hal tersebut dapat dirasakan semenjak munculnya Nasionalisme pada pertengahan tahun 1900-1910, yang dipelopori oleh komunitas pemuda muda yaitu Dr. Soetomo dan teman-

temannya yang berhasil membentuk sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo. Semenjak itulah dinamika pergerakan nasional berkembang dengan pesat. Pada awalnya perkumpulan semacam tersebut hanya sebatas perkumpulan pemuda yang kemudian tumbuh menjadi perkumpulan organisasi massa dan partai-partai yang didukung oleh petani dan buruh. Kemudian pada tahun 1935 Budi Utomo bersatu dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) yang selanjutnya menjadi Parindra (Partai Indonesia Raya) dan bergerak dibidang politik. Kehidupan partai politik dapat dilihat melalui hasil pemilu sejak berdirinya NKRI.

Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu 1955, dan dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

- Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955,

- Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.

Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini adalah Pemilu pertama setelah orde baru, dan diikuti oleh 10 partai politik. Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1975, diadakanlah penggabungan Partai-Partai Politik melalui Undang-Undang No.3 Tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar. Adapun partai politik tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia.

kemudian pada pemilu di era orde Baru Golkar selalu menang mutlak dalam Pemilu. Adapun hasil perolehan suara Golkar adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Prosentase Perolehan Suara Golkar tahun 1971-1997

Pemilu Tahun	Prosentase Suara Golkar
1971	62,79
1977	62,1
1982	63,9
1987	73,1
1992	68,1
1997	74,5

Sumber: www.wikipedia.com/perolehan-suara-golkar-dikases-tanggal

Dimulai pada Pemilu pada tahun 1971 Golkar mendapat 62,79% suara, tahun 1977 mendapatkan 62,1%, pada tahun 1982 memperoleh 63,9, tahun 1987 memperoleh 73,1%, tahun 1992 memperoleh suara 68,1, dan kemudian pada pemilu terakhir masa orde baru pada tahun 1997 Golkar mendapatkan suara 74,5%. Dari semua hasil pemilu di era orde baru mutlak selalu dimenangkan oleh Golkar.

Pemilu berikutnya, sekaligus Pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru, yaitu Pemilu 1999 dilaksanakan pada tahun 1999 (tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999) di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik.

Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak dengan perolehan suara sekitar 35 persen¹¹, yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid (Pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR

tahap ini sepele dari kesadaran politik masyarakat sudah mulai meninggalkan bentuk-bentuk organisasi politik tradisional, namun pada saat bersamaan belum menemukan penggantinya yang sesuai.

- b. **Polarisasi**, dalam tahap ini partai berusaha untuk menerobos dinding sosial tradisional yang melindungi faksi yang saling bersaing secara personal. Proses ini didukung oleh kondisi eksternal yang cukup memadai. Meningkatnya kesadaran politik warga negara dengan sendirinya memperluas ruang lingkup partisipasi politik. Momen penting ini segera diikuti dengan meluasnya jenis dan macam kelompok-kelompok politik yang menghasilkan sebuah masyarakat majemuk dan kompleks.
 - c. **Ekspansi atau perluasan**. Pada tahap ini partai berkembang menjadi organisasi politik yang semakin membutuhkan dukungan massa yang luas dan beragam serta berlapis-lapis merupakan syarat pokok untuk membangun kekuatan partai. Kekuatan-kekuatan sosial yang tumbuh dan berkembang membutuhkan sistem partai sebagai sarana menyalurkan dan mengendalikan eksistensi kepentingan kelompok.
 - d. **Pelebagaan**. Pada titik ini sistem partai relatif telah
- yang ditandai dengan terbentuknya

sistem dua partai, sistem multi partai, atau sistem partai tunggal dominant. Sistem partai yang telah terlembaga relatif tidak banyak mengalami perubahan kuantitas. Pergantian lebih banyak terjadi pada aspek peralihan pemerintahan oleh partai atau koalisi partai lain.

Pada umumnya di Indonesia sering terjadi salah pemaknaan antara Organisasi dengan Inststitusi. Pada dasarnya antara Organisasi dengan institusi memiliki perbedaan nilai didalamnya. Untuk bisa membedakannya Norman Uphoff¹² mengategorikan keduanya sebagai berikut:

- a. Organisasi yang bukan institusi
- b. Institusi yang bukan organisasi
- c. Dan organisasi yang merupakan sebuah institusi

Demikian pula sebaliknya. Sehingga belum tentu sebuah organisasi berupa institusi demikian juga institusi belum tentu berupa organisasi. Menurutnya terdapat nilai-nilai dan perilaku yang kompleks yang ada dari waktu ke waktu untuk bias disebut sebagai institusi.

“Institutions are complexes of norms and behaviours that persist over time by serving some collectively valued purposes”

Meskipun tidak secara spesifik mengelaborasi institusionalisasi dalam konteks Partai politik, namun seperti yang dikemukakan oleh Huntington, menurutnya institusionalisasi adalah sebuah proses dimana sebuah organisasi dan prosedur memperoleh nilai dan stabilitasnya.

Seperti yang dikatakan oleh Vicky Randall dan Lars Svendsen, Institusionalisasi Partai Politik adalah proses pematangan partai politik baik secara structural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara cultural dalam mempolakan sikap dan budaya.

“the process by which the party becomes established in terms of both integrated patterns on behavior and of attitudes and culture”¹³

Proses kelembagaan ini mengandung dua aspek, pertama, aspek internal-eksternal, kedua, aspek structural-Attitudinal. Kemudian jika kedua aspek ini dipersilangkan maka akan tampak terdapat table empat sel yaitu Systemness, Decision Autonomi, Value Infusion, Reification. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat melalui tabel dibawah ini.

Tabel 1.4

**Matriks Insitusalisasi Partai Politik
Versi Randall dan Svasand¹⁴**

Dimention	Internal	Eksternal
Structural	Kesisteman (Systemness)	Decision autonomy
Additional	Value infusion	Reification

Dari penyilangan kedua dimensi tersebut diketahui bahwa:

1. Kesisteman (Systemness)

Yang dimaksud dengan Systemness atau kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik derajat kesisteman sebuah partai politik dapat dilihat dari:

- a. asal-usul partai, apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah;
- b. siapa yang lebih berpengaruh antara pemimpin dengan partai politik

c. siapa yang lebih menentukan antara faksi-faksi atau partai secara

- d. bagaimana Partai politik menjaga relasi dengan anggota dan simpatisan, apakah dengan klientilime (pertukaran dengan pemberian materi)ataukah berdasar konstitusi partai.

2. Value Infusion

Value infusion berkaitan dengan identitas sebuah partai politik berdasarkan platform partai, basis social pendukung, dan identifikasi anggota terhadap pola arah perjuangan yang diperjuangkan partai politik tersebut. Jadi Value infusion sebuah partai politik terkait dengan:

- a. hubungan parpol dengan popular bases atau kelompok tertentu
- b. pengaruh klientelisme dalam organisasi berupa kecenderungan sifat relasi yang instrumentalis atau ideologis

Partai politik yang mempunyai basis sosial pendukung yang spesifik niscaya akan memiliki identitas nilai yang jelas. Partai buruh sesuai dengan namanya jelas memiliki basis sosial pendukung yang jelas buruh karena pola dan arah perjuangan partai itu memperhatikan kepentingan buruh, dan Partai Republik di Amerika Serikat memiliki basis sosial pendukung yang jelas, yaitu kulit putih menengah ke atas beragama Protestan.

Enam partai politik peserta pemilu yang 1999 yang berhasil memenuhi ketentuan electoral threshold, memang sudah memiliki ciri ideologi yang dikenal masyarakat, seperti nasionalisme/kebangsaan untuk PDIP dan Partai Golkar, Islam untuk PPP, NU untuk PKB, dan Muhammadiyah untuk PAN.